

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH SULAWESI TENGAH
UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN
RUMAH SAKIT DALAM PENERAPAN APLIKASI
INDIKATOR NASIONAL MUTU**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum



diajukan oleh
Pranasista Berliana Lajuck
NIM 23.C2.0108

Kepada
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIKA SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2026

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Pranasista Berliana Lajuck
NIM : 23.C2.018
Prodi / Konsentrasi : Magister Hukum Kesehatan
Fakultas : Hukum Dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul ” Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Dalam Penerapan Aplikasi Indikator Nasional Mutu (INM)” tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 31 Januari 2026

Yang Menyatakan,



Pranasista Berliana Lajuck
NIM : 23.C2.018

ABSTRAK

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab hukum dalam melakukan pembinaan dan pengawasan guna menjamin mutu pelayanan rumah sakit, termasuk melalui penerapan Aplikasi Indikator Nasional Mutu (INM). Penelitian ini membahas tanggung jawab pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit melalui penerapan Aplikasi Indikator Nasional Mutu (INM).

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis sosiologis dengan analisis kualitatif, dengan memadukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu, dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan laporan capaian indikator mutu rumah sakit di Provinsi Sulawesi Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam penerapan Aplikasi Indikator Nasional Mutu (INM) telah memiliki dasar hukum yang kuat, dan pelaksanaan dilakukan melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD Undata dan RSUD Madani. Hasil dari pembinaan dan pengawasan bahwa penerapan INM belum mencapai standar yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh belum tersedianya regulasi tingkat daerah, keterbatasan SDM dan sarana prasarana. Di samping itu budaya hukum di lingkungan manajemen RS belum terbangun dengan baik sehingga kepatuhan terhadap ketentuan INM belum mencapai standar (dari 13 indikator baru 25-30% yang terpenuhi). Namun demikian tindak lanjut penerapan sanksi belum dapat dilakukan. Oleh karena itu yang baru dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan berupa edukasi. Sehingga direkomendasikan untuk dibentuk Tim Mutu Provinsi dan pembentukan Pergub dan penyesuaian Perda No 1 tahun 2024 dengan PP no 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan dari UU no 17 tahun 2023

Kata kunci: Tanggung Jawab, Pengawasan, Mutu Pelayanan, Indikator Nasional Mutu, Rumah Sakit.

ABSTRACT

Regional governments have a legal responsibility to provide guidance and supervision to ensure the quality of hospital services, including through the implementation of the National Quality Indicators (NIQI) Application. This study examines the responsibility of guidance and supervision of the Central Sulawesi Provincial Government in improving the quality of hospital services through the implementation of the National Quality Indicators (INM) Application.

This study uses a sociological legal method with qualitative analysis, combining a review of laws and regulations, specifically Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Law Number 17 of 2023 concerning Health, Government Regulation Number 28 of 2024, and Minister of Health Regulation Number 30 of 2022 concerning National Quality Indicators, with empirical data obtained through interviews and reports on hospital quality indicator achievements in Central Sulawesi Province.

The results indicate that the responsibility of the Central Sulawesi Provincial Government in implementing the National Quality Indicators (INM) Application has a strong legal basis, and implementation is carried out through a guidance and supervision mechanism for Undata Regional General Hospital and Madani Regional General Hospital. The results of the guidance and supervision indicate that the implementation of INM has not yet met the established standards. This is influenced by the lack of regional regulations, limited human resources, and limited infrastructure. In addition, the legal culture in The hospital management environment has not been well developed, resulting in compliance with the National Inspection Standards (INM) requirements (only 25-30% of 13 indicators have been met). However, follow-up sanctions have not yet been implemented. Therefore, the only way forward is through education and coaching. Therefore, it is recommended to establish a Provincial Quality Team, establish a Gubernatorial Regulation, and align Regional Regulation No. 1 of 2024 with Government Regulation No. 28 of 2024 concerning the Implementation of Law No. 17 of 2023.

Keywords: *Responsibility, Supervision, Service Quality, National Quality Indicators, Hospitals.*